

PEREMPUAN DAN KEKUASAAN POLITIK DALAM PEMILUKADA DKI JAKARTA TAHUN 2012

UMAIMAH WAHID
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Abstrak

Penelitian mengenai tidak adanya keterwakilan perempuan dalam Pemilu DKI Jakarta 2012, bertujuan untuk melakukan pemetaan kekuasaan politik di Provinsi DKI Jakarta dan menjelaskan, mengkritisi, dan melakukan evaluasi mengenai dukungan partai politik dan pemerintahan DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan berpartisipasi dalam politik praktis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Komunikasi Politik yang fokus pada pemahaman politik dan perempuan sebagai kandidat politik, konsep kekuasaan hegemoni realiti politik perempuan, serta feminis radikal. Penelitian ini menggunakan Paradigma Kritis dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian studi kasus, dan feminist research. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuasaan perempuan dalam politik di provinsi DKI Jakarta masih sangat minimum dibanding dengan kaum laki-laki yang selama ini mendominasi politik, bahkan perempuan belum pernah ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada hakikatnya perempuan mempunyai peluang besar menjadi pemimpin Jakarta; namun diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari perempuan untuk memperkuat diri dan meningkatkan kualitas mereka sehingga mampu mengurangi dominasi satu kelompok masyarakat. Dukungan partai politik sangat penting dalam meningkatkan kualitas politik perempuan.

Kata Kunci: *Perempuan; Kekuasaan Politik; Pemilu 2012-DKI Jakarta*

WOMEN AND POLITICAL POWER IN THE 2012 DKI JAKARTA ELECTION

Abstract

This study intends to perform political power-mapping in the DKI Provincial Jakarta to clarify, to critic and to evaluate the ideologies of political parties and the governance of DKI Jakarta in the effort to increase the participation of women in political practices. It is observed that there is no representative in the 2012 DKI Jakarta election. Political Communication Theory is used in this study focusing on the political ideologies and women as political candidates, the concept of power and hegemony of women political reality and radical feminist. This observation uses the Critical Paradigm through qualitative approach, case study and feminist research. The result of the observation reveals that the power of women in politics in the DKI Jakarta provincial is still at the minimal level compared to men who dominate the political arena. In fact, there has never been any women who nominated to be a candidate nor were nominated by a political party to be a candidate as a Governor. In reality, women has a bigger chance to be the leader of Jakarta. What is needed is endless effort from the women themselves to strengthen themselves and increase their quality until they are able to decrease the domination of the other group of society. The support of political parties are vital to increase the political quality of women.

Keywords: Women; political power; election 2012 – DKI Jakarta

PENDAHULUAN

DKI Jakarta adalah ibukota negara Indonesia dan sering disebut sebagai kota metropolitan kerana perkembangan dan perubahan kota Jakarta yang meliputi semua aspek kehidupan, dan sekaligus mempertemukan pelbagai suku, etnis, kelompok masyarakat, organisasi, tujuan, dan kepentingan di dalamnya. Sebagai ibukota negara Republik Indonesia maka sangat logis jika pelbagai perubahan dimulai dari Jakarta. Tarafhidup masyarakat Jakarta juga lebih baik dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Jakarta adalah pusat pemerintah, ekonomi, politik, sosial, dan pusat perkembangan media massa. Sebagai pusat dari kehidupan di Indonesia, Jakarta memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

Apabila dilihat dari sudutpandang demokrasi dan keadilan bagi setiap individu

dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dalam kehidupan yang mereka jalani, maka keadaan marjinal tampak jelas dalam politik DKI Jakarta. Diskriminasi yang dimaksud tampak jelas pada sektor publik sebenarnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan DKI Jakarta sudah cukup memadai. Namuntetap belum memadai jika dibandingkan keterwakilan kaum laki-laki. Pada peringkat birokrasi pemerintahan DKI Jakarta, keterwakilan dan representasi kaum perempuan sudah cukup memadai berdasarkan pemilihan umum 2009. Anggota Parlimen perempuan DPRD DKI Jakarta bagi tahun 2009-2014 sejumlah 22% iaitu 22 orang. Dilihat dari jumlah tersebut sebenarnya jumlah tersebut sudah cukup memadai iaitu 22% dari keseluruhan jumlah anggota DPRD 2009-2014. Namun, jumlah yang besar itu belum dapat memenuhi ketentuan kuota keterwakilan 30% perempuan. Dan yang paling ironis adalah tidak ada satupun calon baik wakil parti politik mahupun calon bebas perempuan sebagai calon Gabenor atau Wakil Gabenor DKI Jakarta dalam pemilihan umum 2012.

Kebenaran akan tidak adanya keterwakilan atau representasi perempuan pada pemilihan Gabenor atau Wakil Gabenor DKI Jakarta sebenarnya bukan hanya pada tahun 2012 ini saja, melainkan dari pertama pemilihan umum dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta hingga abad Millenium ini. Pemilukada 2012 tidak terlihat ada satupun calon perempuan dari lima pasangan calon Gabenor atau Wakil Gabenor yang mendaftarkan diri ke KPU. Kemajuan Jakarta di segala bidang berimplikasi secara jelas bagi kaum perempuan Jakarta. Keadaan kaum perempuan Jakarta dinyatakan sudah cukup memadai dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kemajuan tersebut ditunjang oleh perkembangan kota Jakarta yang lebih terbuka dengan perubahan-perubahan baru. Keadaan tersebut ditunjang juga keadaan pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebahagian kota-kota lainnya di Indonesia. Ini bermakna sudah sangat wajar jika perempuan Jakarta lebih maju baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemahaman umumnya.

Kemajuan kaum perempuan Jakarta makin terserlah dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya termasuk bidang politik. Namun dalam bidang politik, ternyata perempuan DKI Jakarta kurang mempunyai minat untuk aktif di politik sebagai pemimpin DKI Jakarta atau Gabenor dan Wakil Gabenor. Dalam sejarah perpolitikan, Provinsi DKI Jakarta sejak awal kemerdekaan tahun 1945 belum terdengar satupun perempuan Jakarta yang pernah memimpin Jakarta. Bahkan menjadi calon Gabenor atau Wakil Gabenor pun belum pernah ada. Dan tidak adanya perempuan sebagai calon pemimpin puncak provinsi DKI Jakarta – semakin mengherankan kerana peluang untuk mencalonkan diri sebagai calon bukannya melalui parti politik, melainkan juga tahun ini untuk yang pertama sekali calon Gabenor atau Wakil Gabenor dapat menempuh pintu ‘calon independen’. Maknanya jalan semakin terbuka bagi calon perempuan mencalonkan diri sebagai calon kerana bukan hanya melalui parti politik yang selama ini dianggap cenderung ‘maskulin’. Namun nyatanya peluang yang semakin terbuka dan besar tetap tidak meningkatkan niat perempuan yang

ada di DKI Jakarta khususnya untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Maka berdasarkan keadaan yang ada, patut dipertanyakan apakah penyebab perempuan enggan maju sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur?

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dinyatakan telah berlangsung dominasi yang sangat kuat dan mengakar oleh kaum laki-laki dalam lingkungan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Dominasi tersebut semakin kuat kerana tanpa sedar juga didukung kaum perempuan Jakarta. Sukarmendukung perempuan lainnya yang hendak maju atau berkeinginan menjadi calon sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam suatu pemilihan pejabat yang berlangsung, kaum perempuan menjadi bahagian yang memelihara dominasi kaum laki-laki kerana sikap 'common sense' mereka terhadap keadaan perempuan yang dikonstruksi laki-laki. Sehingga secara tidak langsung kaum perempuan justru menjadi bahagian dari proses pemeliharaan status quo kaum laki-laki dalam mempertahankan kekuasaan mereka di Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan pada sistem patriarki yang sangat dinikmati kaum laki-laki sebagai sesuatu yang integral dalam proses budaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peta kekuasaan politik di Provinsi DKI Jakarta khususnya kaum perempuan? (2) Mengapa representasi perempuan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur minim bahkan tidak ada dalam pemilihan umum daerah Provinsi DKI Jakarta? (3) Bagaimana dukungan parti politik dan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesedaran perempuan berpartisipasi dalam politik praktis?

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan teori Kekuasaan Politik dan Subjektivitas Perempuan dalam Gerakan Counter Hegemoni. Menurut Oxford English Dictionary, Helliwell dan Hindes (dalam Taylor, ed. 1999: 73), terdapat beberapa makna tentang kata kekuasaan iaitu "kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Para sosiologis memahami kekuasaan dalam konteks ini sebagai kapasiti untuk mendapatkan pihak lain tersebut hendak melakukan apa yang diharapkan atau diminta dilakukan oleh pihak lain dimaksud. Seperti Presiden terhadap populasi rakyatnya dan orangtua atas anak-anak mereka dan sebagainya". Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasiti atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, iaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan/perbedaan di

dunia.(Taylor, 1997: 73).

Kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat awam dan masyarakat politik. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat awam dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat awam. Namun, jika keadaan kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi dialami masyarakat awam yang disebabkan hegemoni kelompok penguasa dan kaum borjuis termasuk kaum intelektual, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya bahawa akan selalu ada kekuatan-kekuatan yang dipergunakan untuk melawan tekanan dan sikap represif penguasa (Salam, 1981).Dipercayai juga akan ada cara-cara politik yang kreatif dan cerdas dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau menerima hegemoni ideologi yang menindas. Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan cara soft, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru.Kelas dominan, sebagaimana fahaman Marxis yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi yang berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.(Simon, 1999)

Dominasi laki-laki dan subordinasi atas perempuan juga kerana distribusi kekuasaan yang tidak sama. Laki-laki dengan dukungan sistem patriarkal, selama ini secara sosial dan budaya mendukung mereka dengan berleluasa menciptakan realiti yang tetap merugikan perempuan.Pemahaman dan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan atas perempuan kekal dengan berbagai bentuk; terkadang upaya itu tanpa sedar didukung oleh perempuan sendiri, keluarga bahkan kekuasaan negara.Pemahaman patriarki tersebut menyebabkan konstruksi konsep tentang perempuan menjadi diskriminatif dan menguntungkan laki-laki. Konstruksi sosial, menurut Affan Gaffar (2001: 4), membutuhkan perempuan (wanita dalam bahasa Affan Gaffar) dan tidak memungkinkan mereka untuk berperanan secara aktif dalam politik. Kekuasaan laki-laki sangat kuat dan didukung sistem sosial dan budaya membuat penyertaan perempuan dalam politik sangat jarang mencapai puncak dan seandainya ada maka lebih banyak keranarealiti di luar mereka atau larangan sistem yang melingkupi dan menguasai mereka.Realiti tersebut membuat perempuan harus keluar – berontakserta tidak mau hanya sekedar dijadikan instrumen politik.Pendukung setia parti politikatau dimanfaatkan kenaifan mereka untuk mencapai tujuan kelompok yang memiliki kekuasaan atas perempuan tersebut.Sebagai alat mobilisasi politik, perempuan hanya menjadi kendaraan bagi seseorang, kelompok bahkan negara.

Menurut Oxford English Dictionary,Helliwel dan Hindes (dalam Taylor, edt. 1999: 73), terdapat beberapa makna tentang kata kekuasaan, iaitu:

1. Kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Para Sosiolog memahami kekuasaan dalam konteks ini sebagai kapasitas untuk mendapatkan pihak lain tersebut, mau melakukan yang diharapkan/diminta lakukan oleh pihak lain dimaksud. Seperti Presiden terhadap populasi rakyatnya dan orangtua atas anak-anak mereka dan sebagainya.
2. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.
3. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konsteks ini berhubungan dengan agency, bahawa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. (Taylor, 1997: 73).

Kekuasaan menjadikan perempuan berani bicara untuk menyatakan dan memperdebatkan apayang mereka inginkan dan harapkan terjadi. Dalam konteks ini diperlukan kemampuan mereka untuk mengoptimalkan kekuatan bahasa dalam mengkonstruksi realiti, Sebagaimana dinyatakan oleh Castell, (1997: 359) bahawa kekuasaan sampai bila pun tetap merupakan aturan sosial yang membentuk dan mendominasi kehidupan sosial itu sendiri. Lebih lanjut menegaskan bahawa kekuasaan adalah arkitek dunia sosial. Kekuasaan yang merancang kesesuaian peranan dalam insteraksi dan struktur sosial (Westwood, 2002: 5).

Atas alasan tersebut, maka perempuan harus memiliki kekuasaan dan kesempatan menjalankan kekuasaan tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang sama dan kekuasaan seimbang dengan laki-laki. Kekuasaan yang dimiliki akan menyebabkan distribusi kekuasaan dapat seimbang dan merata bagi perempuan dan laki-laki. Namun, pada kenyataannya kekuasaan hanya ada pada kelompok tertentu iaitu laki-laki sangat dominan sehingga berakibat buruk pada realitiperempuan. Dominasi laki-laki dan subordinasi atas perempuan juga disebabkandistribusi kekuasaan yang tidak sama. Laki dengan dukungan systempatriarchal yang selama ini secara sosial dan budaya mendukung mereka dengan leluasa menciptakan realiti yang tetap merugikan perempuan. Pemahaman dan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan atas perempuan kekal dengan pelbagai bentuk; terkadang upaya itu tanpa sedar didukung oleh perempuan sendiri, keluarga bahkan kekuasaan negara.

Konsep lainnya yang digunakan adalah mengenai Pemilukada. Pemilihan Umum adalah perwujudan dari demokrasi untuk menyalurkan partisipasi politik rakyat secara langsung. Bila mengacu pada jenis partisipasi politik menurut frekuensi dan intensitasnya, menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan politik yang tidak intensif (tidak menyita waktu, dan bukan

kerana prakarsa sendiri) seperti memberi suara dalam pemilihan umum adalah besar sekali. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu parti atau kelompok kepentingan, contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Miriam Budiardjo: 1998).

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Melalui Pemilukada rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinya yang mereka nilai aspiratif, kapabel, kredibel, dan akseptabel. Inilah lompatan demokrasi yang cukup penting dalam sistem politik Indonesia, dari yang bercorak sentralistik di masa Orde Baru menjadi desentralistik di Era Reformasi (Zuhro: 2009).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemilihan kepala daerah dan wakilnya diselenggarakan secara langsung melalui Pilkada. Dalam UU ini Pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (Pemilu), Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma adalah cara pandang terhadap realiti, dan merupakan sistem kepercayaan mendasar yang mengarahkan alur pikir guna menentukan pilihan-pilihan pendekatan yang digunakan bagaimana hal tersebut dilakukan di lapangan oleh peneliti (The Paradigm Dialogue, Egon C. Guba, ect, dalam The Alternatif Paradigm Dialogue, 1990: 17). Menurut Guba dan Lincoln (1994: 109) dalam bukunya “Competing Paradigm in Qualitative Research”, dijelaskan bahawa paradigma adalah serangkaian kepercayaan mendasar (metaphysics) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pertama, di mana diutarakan bagaimana realiti difahami dan dipandang. Menurut mereka terdapat empat paradigma iaitu: Positivism, Postpositivism, Critical Theory, dan Constructivism.

Paradigma yang dipakai dalam penelitian mengenai “Politik dan Kekuasaan Perempuan, Studi Kasus Minimnya Calon Perempuan dalam Pemilukada DKI Jakarta” adalah Paradigma Kritis atau Critical Theory. Paradigma Kritis adalah paradigma yang sangat menaruh perhatian terhadap upaya pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik realiti yang tampak guna dilakukan sebuah kritik dan perubahan (Critique and Transformation) terhadap struktur sosial (Guba and Lincoln, 1994: 109).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menfokuskan

pada penelitian studi kasus (case study). Studi kasus adalah sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Peneliti tidak terlalu mengontrol peristiwa yang diteliti, namun menfokuskan atas fenomena kontemporer dalam beberapa konteks kehidupan. Menurut Yin dalam bukunya *Case Study Design and Method*, (1989: 13) menyatakan bahawa strategi penelitian studi kasus dipakai untuk menguji peristiwa kontemporer yang berkaitan dengan prilaku dan hampir tidak dapat dimanipulasi fakta yang ada.

Menurut Yin(2011:1), secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how dan why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer(masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya Yin(2011:13), mengungkapkan untuk studi kasus, kelebihan tampak bilamana pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa” akan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, di mana penelitiannya hanya mampu memiliki peluang yang kecil sekali atau tak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut.

Dalam pemahaman peneliti bahawa kasus tidak adanya calon perempuan dalam pemilukada provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah kasus yang pantas diteliti. Hal tersebut kerana DKI Jakarta adalah pusat perkembangan dan kemajuan segala bidang termasuk politik dan pemberdayaan kaum perempuan, namun ironisnya, justru dalam sejarah pemilukada DKI Jakarta justru tidak ada satupun calon perempuan, situasi tersebut bahkan tetap sama dalam pemilukada tahun 2012 ini. Penelitian ini menfokuskan pada pertanyaan penelitian bagaimana dna mengapa keadaan atau realiti tersebut dapat berlangsung, apa sebenarnya yang menjadi persoalan yang sesungguhnya, serta bagaimana mennjelaskan keadaan yang dialmai kaum perempuan tersebut.

Metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian yang bertemakan 'Perempuan dan Kekuasaan Perempuan' adalah analisis multiperingkat dengan alasan kompleks. Walau seharusnya diskriminasi terhadap perempuan terutama di lembaga akedemis semestinya tidak terjadi apapun alasan yang melatarbelakanginya. Namun, pada realitinya tidak dapat disangkal bahawa marjinalisasi kekuasaan kaum perempuan pada proses Pemilukada DKI Jakarta 2012 tetap persoalan marjinalisasi kaum perempuan dan kekuasaan merupakan persoalan yang sangat ada.

Unit analisis penelitian ini adalah:

1. Kaum perempuan tokohpartai dan politisi perempuan yang pmaknanya mengusung calon pada Pemilukada 2012 iaitu:
 - a. Parti Demokrat, Neneng Hasanah
 - b. Parti Golkariaitu Nurul Arifin, M.Si. P

- c. PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, Anggota DPRD Fraksi PDIP
2. Pemimpin/Pengurus Partai politik, iaitu:
 - a. Parti Demokrat
 - b. Parti Golkar
 - c. PDI Perjuangan
 - d. d. Parti Amanat Nasional (PAN)
3. Tokoh perempuan pemerhati keterwakilan perempuan dalam politik, seperti akademisi/pakar, LSM, dan pengurus Ormas.

Tokoh masyarakat, pemerintahan dn tokoh perempuan yang diwawancarai adalah:

1. Nadia Umar, M.Si., Ketua KPU DKI Jakarta 2010-2015
2. Prof. Dr. Sylvia Murni, M.Si.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah pemerhatian dan wawancara. Pemerhatian adalah proses yang berupaya itu memerhati realiti politik perempuan yang berlangsung di DKI Jakarta tahun 2012 berkaitan dengan PemiluKada 2012. Pemerhatian berdasarkan pada struktur birokrasi yang ada. Pemerhatian yang dilakukan adalah pemerhatian terbuka iaitu pemerhatian yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi subyek pemerhatian. Pemerhatian dilakukan untuk memperoleh bukti otentik di lapangan dalam pelbagai peristiwa baik formal maupun informal mengenai permasalahan marjinalisasi perempuan dalam PemiluKada Provinsi DKI Jakarta 2012.

HASIL DAN ANALISIS DATA

Perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya di politik dipandang oleh kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial dan merugikan perempuan. Keadaan itu oleh kaum perempuan disadari telah diakibatkan kaum perempuan hingga abad Millinium ini masih mengalami ketertindasan baik di bidang publik maupun domestik. Pembahagian ruang publik yang lebih dominan bagi laki-laki dan ruang publik untuk kaum perempuan adalah sangat berhasil.

Perempuan belum menjadi individu menarik dalam kepemimpinan DKI Jakarta, padahal perempuan-perempuan DKI Jakarta diyakini lebih banyak yang berkualiti dan layak mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta. DKI Jakarta yang merupakan provinsi yang berstatus daerah khusus, sebagai ibukota adalah pusat negara Indonesia, kota metropolitan dengan tingkat pendidikan yang paling maju. Tingkat kualiti hidup yang baik, dan pengembangan masyarakat

yang pesat. Keadaan DKI Jakarta tersebut seharusnya menjadikan masyarakat Jakarta khususnya kaum perempuan selayaknya maunculkan menjadi pionir dalam perubahan Jakarta termasuk dalam politik. Dengan keadaan tersebut, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencari calon pemimpin perempuan. Namun kenyataannya, sampai pemilu daerah pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang baru berlangsung, dari enam calon pasangan calon yang mendaftarkan diri tidak ada satupun dari pasangan Cagub/Cawagub yang diusung oleh partai terdapat calon perempuan. Perempuan tidak ada yang mendapat kepercayaan dari partai politik calon. Walau pada awalnya ada satu dua perempuan yang menyatakan diri berminat mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, akhirnya dalam proses Pilkada 2012 tidak terdapat satu orang pun perempuan sebagai calon.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat awam yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat di dominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan. Perempuan sampai detik ini, masih memahami diri mereka sebagai bagian dari struktur masyarakat yang mereka anggap lebih tinggi, yaitu laki-laki dan negara. Konsep kehidupan mereka ditentukan dan difahami oleh budaya kelompok penguasa dan negara. Kelompok penguasa dan negara di dominasi oleh laki-laki yang diakibatkan dari konstruksi sistemik selama ini sehingga kehidupan politik juga di dominasi oleh kaum laki-laki, yang selama ini secara budaya lebih memiliki keterbukaan kesempatan dan di identifikasi dengan wilayah dan peranan publik. Semua itu mempengaruhi penguasa dan kaum laki-laki yang memiliki hegemoni dan ideologi dominan dan memandang perempuan sebagai individu berdasarkan pemahaman budaya patriarki yang sangat mengutamakan laki-laki dan sekaligus mempengaruhi dan mengikat konstruksi perspektif perempuan dalam memahami diri dan lingkungan mereka.

Dalam tataran konseptual dan realiti sehari-hari, perempuan masih diperlakukan sebagai manusia 'peringkat' kedua, di mana laki-laki berada pada peringkat pertama. Norma budaya menempatkan perempuan pada posisi sebagai the second sex, dan perempuan masih menduduki warga kelas dua. Konsep dan konstruksi ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah pembahagian ruang kehidupan menjadi 'peribadi dan publik'. Ruang peribadi dengan segenap kewajiban domestik adalah milik perempuan, sehingga telah terjadi domestikasi peranan perempuan. Aktiviti perempuan selalu dikaitkan dengan persoalan domestik hanya kerana mereka perempuan, sementara dunia publik diperuntukkan bagi laki-laki dan mereka memiliki kesempatan melakukan elaborasi mengenai diri dan kehidupan mereka, tanpa terlalu dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peranan dan tanggung jawab domestik. Dikotomi Peribadi-publik berakibat pada pemahaman bahawaruang publik tidak cocok bagi perempuan kerana dianggap terlalu berbahaya, kasar atau dikaitkan dengan tanggungjawab perempuan sebagai perempuan, istri dan ibu. Realiti kehidupan selalu terpisah berdasarkan peranan-

perananperibadi-publik.

Meningkatnya minat perempuan terjun ke wilayah politik dapat dikatakan sebagai akibat dari ketentuan kebijakan kuota 30 % perempuan di wilayah politik. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh penggiat perempuan yang konsen pada isu keterwakilan dalam politik, pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan positif mediamassa dengan berbagai liputan dalam perjuangan mengenai perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Beberapa calon kepala daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang juga berhasil menjadi kepala daerah seperti Gabenor Provinsi Banten, Walikota Surabaya, Walikota Tangerang Selatan, Wakil Gabenor Jawa Tengah, Bupati Minahasa, Bupati Karanganyer, dan lain-lain. Sementara yang mencalonkan dirinamun masih belum berhasil seperti Khofifah Indarparawangsa sebagai calon Gabenor Jawa Timur, Dr. Marissa Harque Fauzie sebagai calon Gabenor Banten, dan lainnya.

Keadaan tersebut berlangsung di daerah-daerah di luar DKI Jakarta, yang secara langsung memperlihatkan ketertarikan yang semakin besar perempuan untuk aktif di politik. Namun, apakah keadaan tersebut tumbuh kerana kesedaran kaum perempuan mengenai politik? Tentu hal itu masih belum dapat dijawab secara pasti, kerana dibutuhkan penelitian ulang dan terus menerus termasuk berkaitan dengan aplikasi dan implikasi keterwakilan perempuan dalam politik yang didasarkan atas kesedaran individu. Persoalannya bagaimana dengan perempuan-perempuan di DKI Jakarta?

Berdasarkan sejarah politik provinsi DKI Jakarta dari pemilihan pertama sampai pemilihan umum langsung, terakhir tahun 2012 dan menempatkan Joko Widodo dan Besuki Thahja Purnama sebagai Gabenor dan Wakil Gabenor DKI Jakarta periode 2012-2017. Selama pemilihan tersebut baik masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi belum terdapat perempuan yang dipercaya oleh parti politik untuk dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil Gabenor. Pada tahun 2011 dan 2012 pemilihan umum daerah DKI Jakarta terdengar beberapa nama perempuan yang menaruh minat mencalonkan diri sebagai calon Gabenor DKI Jakarta seperti Wanda Hamidah (Pengurus Parti Amanat Nasional, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, dan anggota Komisi E) dan Saudara Hasnaini yang merupakan aktivis Parti Demokrat.

Pada dasarnya semangat dan keinginan kaum perempuan untuk aktif dalam politik sudah ada, akan tetapi kekuatan parti politik dominan iaitu parti politik yang umumnya pengurusnya adalah laki-laki; belum tertarik untuk menjadikan perempuan sebagai calon mereka. Ketidakpercayaan parti politik kepada perempuan sebenarnya tidak relevan, kerana proses dan pelaksanaan Pemilu di DKI Jakarta sangat bagus dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Namun sangat disayangkan pelaksanaan pemilu yang begitu baik tidak diikuti dengan partisipasi perempuan sebagai calon.

Kejayaan pemilu Daerah DKI Jakarta diamini oleh Prof. Dr. Silviana Murni,

M.Si, Sekretaris Bidang Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang menjelaskan bahawa pemilu DKI Jakarta yang berlangsung dua putaran, hasilnya sesuai dengan aturan Pemilu. Semangat masyarakat dan parti politik terlihat dari jumlah calon Gabenor/wakil Gabenor yang ikut dalam pertarungan Pilkada yang berlangsung. Terdapat enam pasang calon yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama belum bisa dinyatakan sah keluar sebagai pemenang, kerana belum ada yang mencapai 50 %, kemudian diambil dua pasangan dengan hasil suara yang terbanyak, untuk mengikuti Pilkada putaran kedua. Pelaksanaan relatif cukup obyektif, cukup cerdas, dan terbuka mengenai pemahaman peraturan.

Perempuan secara umum sudah sangat diterima di ranah politik propinsi DKI Jakarta, walaupun penerimaan ini tentu saja tidak mudah dan membutuhkan perjuangan keras agar tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat, terutama dari parti politik. Hal itu merupakan implikasi logis dari dominasi kaum laki-laki dalam politik. Laki-laki masih merupakan pihak yang membuat kebijakan di kancah politik Indonesia termasuk dalam kancah politik DKI Jakarta. Kebolehan mereka para politisi perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta menurut Ida Marmudah sudah membanggakan walau belum terpenuhi kuota 30 %. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Bukti dapat dilihat dari keadaan DPRD Jakarta periode 2009-2014 bahawa jumlah anggota perempuan adalah 22 orang dari 100 orang anggota. Perempuan juga dipercaya sebagai pimpinan seperti sebagai ketua komisi A, wakil ketua komisi A, wakil ketua komisi C, dan lain-lain.

Berdasarkan pandangan-pandangan dari nara sumber yang telah dinyatakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahawa:

1. Pelaksanaan Pemilu Pilkada Propinsi DKI Jakarta 2012 telah berlangsung dengan baik dan merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya.
2. Pemilu Pilkada DKI Jakarta dinyatakan sukses baik dilihat dari pelaksanaan aturan-aturan pemilu maupun jika ditinjau dari partisipasi peserta pemilu iaitu calon yang mencalonkan diri iaitu terdapat 6 pasang calon Cagub dan Cawagub.
3. Kejayaan Pemilu Pilkada DKI Jakarta 2012 ditandai dengan munculnya paradigma baru pemimpin yang disukai masyarakat dan terpilih (walau sebenarnya hal ini bukan hal yang baru), masyarakat menyukai pemimpin yang mempunyai jejak rekam yang baik, jujur, dan membela rakyat dibandingkan calon pemimpin yang hanya melakukan aktiviti politik 'pencitraan' semata.
4. Keberhasilan pemilu Pilkada Jakarta juga sebagai fenomena baru yang dapat dicontoh daerah lain, iaitu mampu menghasilkan pemimpin yang dicintai masyarakat.
5. Namun realitinya belum ada calon perempuan yang diusung oleh parti

politik menjadi catatan tersendiri dan dalam hal ini Jakarta 'kalah' dari propinsi Banten, dan beberapa kabupaten/kotamadya di Indonesia.

6. Tidak adanya calon yang dipercaya dan diusung DKI Jakarta menjadi pertanyaan tersendiri jika dilihat dari kualiti pendidikan perempuan DKI dengan daerahlainnya.
7. Sebenarnya kaum perempuan sudah cukup dipercaya untuk berkiprah sebagai anggota parlemen DKI Jakarta dan di wilayah eksekutif yang memegang beberapa posisi strategis dalam pemerintahan DKI Jakarta seperti Kepala Dinas Bappeda, Sekretaris Pemerintahan DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, dan lain-lain. Realiti tersebut merupakan bukti bahawa perempuan mempunyai peluang untuk maju sebagai orang nomor satu di Jakarta, hanya memerlukan keberanian dan dukungan parti politik.

Perempuan sebagai politisi di DKI Jakarta memang masih minim dibandingkan laki-laki. Jumlah politisi perempuan sedikit dibandingkan kaum laki-laki yang menguasai panggung politik, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keadaan ini sudah cukup baik setelah ketentuan *affirmative action* ditetapkan iaitu ketentuan kuota 30%. Namun hal tersebut tentu saja belum mencukupi jika dilihat dari kuantitas; yang mana perempuan baru berjumlah 22 orang dari 100 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dilihat dari jumlah ini tentu saja belum memadai, belum lagi jika 22 anggota DPRD perempuan sangat mungkin kesemuanya tidak mempunyai kontribusi maksimal. Maknanya masih dibutuhkan perjuangan untuk meningkatkan kesedaran pada kaum hawa khususnya dan masyarakat umumnya.

Diperlukan upaya serius oleh semua parti politik dan kalangan masyarakat terutama kaum perempuan untuk memperjuangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Tentu saja bukan hanya dalam persoalan jumlah perempuan yang aktif dalam politik, melainkan lebih dari itu kesedaran perempuan dalam politik. Oleh kerananya, diperlukan upaya yang sangat serius untuk meningkatkan perempuan dalam politik yang mensejahterakan masyarakat.

Pandangan yang berbeda disampaikan Ketua KPU, Nadia Umar, yang menyatakan bahawa walaupun sebenarnya tidak ada aturan. Pemilu yang mendiskreditkan atau membela secara khusus pencalonan perempuan sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta. Maknanya, peluang sebenarnya terbuka bagi laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Tetapi, kesempatan tersebut tergantung pada kemampuan, kemauan, dan keberanian perempuan yang didukung oleh parti politik. Politik masih menjadi bidang baru bagi perempuan setelah sekian lama politik hanya dimaknai sebagai wilayah dan aktiviti yang cocok bagi perempuan. Keadaan tersebut yang menyebabkan perempuan belum banyak mempunyai kontribusi dalam politik.

Telah terjadi dominasi dalam wilayah politik oleh satu kelompok masyarakat, iaitu kaum laki-laki. Dominasi tersebut akhirnya ikut mempersempit

peluang bagi satu anggota masyarakat lainnya iaitu kaum perempuan selama ini untuk terjun ke wilayah politik. Peluang tersebut semakin sempit setelah pemaknaan sosial budaya ikut-ikutan memberi kontribusi bagi pemahaman aktiviti politik perempuan. Politik secara sosial budaya difahami bukanlah wilayah perempuan, aktiviti yang tidak sesuai bagi perempuan kerana kotor, kasar, dan menghalalkan segala cara. Perempuan juga dilekatkan dengan stereotip budaya seperti emosional, tidak rasional, lemah, dan banyak kompromi serta tidak cepat dalam mengambil keputusan. Alasan-alasan ini hanya menyebabkan ketidakpercayaan parti politik dan masyarakat mengenai aktiviti politik perempuan.

Kontribusi terbatas kaum perempuan dalam politik merupakan implikasi dari proses sosial budaya yang panjang dan melingkupi seluruh kehidupan. Proses tersebut merupakan proses mendalam yang secara integral membentuk mental perempuan dan masyarakat. Politik sampai saat ini masih belum menjadi aktiviti yang nyaman bagi perempuan akibat dari konstruksi di tengah masyarakat mengenai pantas atau tidak pantas perempuan berpolitik. Selama ini perempuan banyak hanya menjadi pelengkap dalam proses politik. Mereka adalah pendukung suami dan organisasi politik, penggembira politik bagi pencapaian aktiviti politik semua mereka.

Fenomena munculnya pemimpin perempuan ternyata cukup sukses di daerah-daerah, namun belum sukses di Jakarta. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan, kota dengan akses pendidikan, keterbukaan, dan sumber perubahan ternyata tidak tersentuh oleh fenomena ini. Sepanjang sejarah Jakarta, belum ada perempuan yang memimpin Jakarta. Bahkan pasca Reformasi yang merupakan momentum keterbukaan dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, tidak ada satupun calon pemimpin Jakarta seorang perempuan. Ada apa sebenarnya dengan DKI Jakarta, apakah tidak ada perempuan yang layak dan tertarik terjun ke politik, atau tidak ada parti politik percaya bahawa perempuan mampu memimpin propinsi DKI Jakarta.

Realiti tersebut mengejutkan bagi peneliti, kerana pelbagai alasan yang telah disebutkan di atas. Perempuan layaknya menjadi salah satu calon yang diperhitungkan dalam percaturan politik. Realitinya Pemilu 2012 DKI Jakarta sebagai provinsi yang menjadi acuan banyak provinsi lain. Perempuan yang selama ini difahami sebagai makhluk tidak rasional, lemah, emosional, dan sebagainya. Berkaitan dengan tidak adanya perempuan sebagai calon DKI Jakarta dalam Pemilu 2012, lebih disebabkan adanya persaingan ketat antara para calon dan perempuan dipercaya tidak kuat bersaing; kerana mereka mempunyai sifat cepat menyerah. Sedangkan persaingan dalam Pemilu Jakarta ketat. Calon yang maju sebagai Cagub dan Cawagub merupakan tokoh-tokoh nasional yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat selama ini.

Walaupun kesempatan sudah terbuka lebar bagi perempuan untuk aktif di politik, namun hal itu belum cukup mampu mengubah keadaan perempuan dalam politik. Keadaan tersebut disebabkan proses konstruksi yang sudah

berlangsung lama dan sudah integral dalam proses kehidupan sosial budaya dan negara. Dibutuhkan upaya maksimal dan dukungan semua pihak untuk mengubah perlahan-lahan carapandang perempuan dan politik. Cara pandang yang tepat diharapkan mampu menciptakan dan menumbuhkan semangat kaum perempuan untuk tertarik berpolitik. Akan tetapi, perubahan yang lebih dan penting adalah menciptakan perubahan sosial budaya sehingga mampu melahirkan proses konstruksi sosial budaya dan politik para tokoh-tokoh perempuan baru, di samping yang sudah dikenal selama ini.

Sebenarnya sudah ada tokoh-tokoh perempuan yang muncul dan aktif di politik dengan kontribusi memadai, akan tetapi tentu saja dengan luas dan jumlah wilayah Indonesia diperlukan perempuan-perempuan berkualitas dan tertarik terjun di politik sebagai bentuk pengabdian mereka dalam mewarnai dan menciptakan prestasi mereka demi mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. Perempuan memerlukan dukungan serius agar mereka mampu berkiprah dengan nyaman di tengah masyarakat. Dukungan yang besar tersebut baik dari masyarakat, lingkungan, dan terutama keluarga. Dukungan keluarga sangat penting, karena keluarga merupakan bahagian yang terdekat dan perempuan berdasarkan nilai sosial budaya, serta politik mempunyai tanggung jawab besar dalam mengurus keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang secara leluasa bahkan difahami sebagai 'kodrati' aktiviti mereka di wilayah publik. Laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah dengan peranan-peranan yang ditasbihkan oleh sosial budaya bahkan politik sehingga aktiviti kaum laki-laki di luar rumah adalah sebuah kemestian dan kewajaran.

Peta kaum perempuan di legislatif, keadaannya juga hampir sama dengan keadaan perempuan di eksekutif DKI Jakarta. Jumlah anggota DPRD propinsi DKI Jakarta periode 2009-2014 adalah 22 orang dari 100 keseluruhan anggota. Keadaan ini sedikit lebih baik dibandingkan 2004-2009 iaitu hanya 15 orang. Dari jumlah anggota perempuan yang ada tentu tidak memadai dan seimbang dengan jumlah anggota laki-laki. Keadaan ini kerana masa terbukanya perempuan aktif dalam politik masih baru, kepercayaan parti politik juga yang terpenting adalah kesediaan perempuan itu sendiri memilih politik sebagai aktiviti hidup mereka.

Realiti lainnya yang melingkupi perempuan adalah ketakutan bersaing dengan calon laki-laki dan tidak adanya dukungan parti politik sebagai calon Cagub dan Cawagub. Realiti tersebut merupakan kombinasi semua alasan yang disebutkan di atas. Tetapi alasan yang paling dominan adalah keranaparti politik yang tidak mendukung pencalonan tersebut, mengingat parti politik belum percaya pada kemampuan perempuan.

Sebenarnya perempuan dapat menjadi bahagian penting dalam proses politik Indonesia saat ini. Namun perempuan harus mempunyai kecakapan yang setara dengan kaum laki-laki. Perjuangan tersebut memang tidak mudah di tengah kemapanan aktiviti politik kaum laki-laki. Bagiamanapun keadaannya perempuan tetap mempunyai peluang besar untuk aktif di wilayah politik iaitu dengan keadaan-konsisi yang mendukung perempuan iaitu:

- a. Berpendidikan,
- b. Populis,
- c. Good looking,
- d. Ilmu yang cukup, dan
- e. Dukungan dana.

Ketidakhadiran perempuan secara terbuka juga diakibatkan oleh ketidaknyamanan kaum laki-laki terhadap aktiviti politik perempuan. Kehadiran perempuan cenderung mengganggu 'status quo' kaum laki-laki yang selama ini mendominasi banyak sektor dalam kehidupan, salah satunya sektor politik. Perempuan yang dianggap 'pintar' cenderung menjadi ancaman bagi realiti laki-laki. Ketidaknyamanan laki-laki atas kesempatan yang semakin luas dalam wilayah publik semakin menegaskan bahawa memang tidak mudah bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di politik tanpa dukungan hal-hal yang disebutkan di atas; terutama dukungan kewangan dan parti politik. Kelebihan kaum perempuan seperti berpendidikan, pengaruh keluarga/keturunan yang dikenal masyarakat dan kecukupan kewangan menjadi modal kuat untuk terjun ke wilayah publik seperti politik.

Dalam wilayah politik kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kaum perempuan akan memudahkan mereka menguasai persaingan politik dengan kaum laki-laki. Realiti tersebut sebenarnya menjadi peluang yang besar bagi perempuan dalam memilih politik sebagai aktiviti mereka, sehingga peta kekuatan perempuan di ranah politik semakin hari bertambah besar dan kuat. Maknanya sebenarnya perempuan sebahagian mempunyai modal untuk itu. Kesempatan politik perempuan semakin luas kerana kegiatan politik perempuan didukung sepenuhnya oleh landasan konstitusi yang cukup baik iaitu kebijakan affirmative action, kuota 30%. Kebijakan tersebut telah membuka peluang yang besar kepada kaum perempuan aktif di politik. Diharapkan keberadaan kaum perempuan tidak hanya sekedar pelengkap saja atau hanya memenuhi peluang semata tanpa kualiti sebagai politisi. Dengan kata lain, kaderisasi merupakan suatu proses yang harus dijalankan oleh parti politik disamping kualiti personal perempuan itu sendiri. Hal itu sangat penting agar calon yang dicalonkan dan yang tersedia mampu menjalankan pemerintahan dengan baik; mencapai kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Perempuan memang tidak cukup hanya mempunyai peluang yang besar, namun harus melakukan berbagai strategi agar mampu bersaing dan menjadi bahagian dari proses politik. Perempuan harus menjadikan kebijakan affirmative action, kuota 30% sebagai entry point masuk ke wilayah politik yang lebih reformasi, ketentuan kuota telah memberikan peluang politik bagi perempuan walau kebijakan ini belum sepenuhnya bisa dilakukan kerana kebutuhan politisi perempuan tidak sebanding dengan kader dan perempuan yang tersedia dan mau aktif di politik.

Kebijaksanaan tersebut hanya bersifat sementara selama proses perjuangan belum seimbang dengan kaum laki-laki dan kedepannya akan dihilangkan sebagai prasyarat berdemokrasi, di mana laki-laki dan perempuan sama di mata hukum. Jadi kaum perempuan tidak bisa menjadi kebijakan kuota ini sebagai kekuatan hukum mengenai keterwakilan perempuan di wilayah politik. Perempuan dituntut untuk melakukan perjuangan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Perempuan dapat menggunakan strategi-strategi komunikasi politik tertentu untuk menjadikan kader politik yang menarik dan disukai oleh masyarakat. Salah satu strategi komunikasi politik yang layak digunakan adalah pemanfaatan media massa semaksimal mungkin untuk sosialisasi, publisitas, dan kampanye yang mampu membentuk imej dan pendapat publik masyarakat.

Strategi yang digunakan politisi agar muncul sebagai kekuatan politik baru yang mensejahterakan masyarakat dengan menjadi politisi selebriti atau polibriti. Strategi komunikasi politik dengan memanfaatkan media massa semaksimal mungkin untuk kepentingan politik perempuan. Walau hal itu tidak mudah karena isu-isu perempuan dalam politik bukan isu yang menarik bagi media. Kekuasaan dalam politik ke depan merupakan suatu kemestian kerana dengan memiliki kekuasaan perempuan lebih dapat menggunakan kekuasaan mereka bagi kepentingan khalayak secara lebih baik. Disini, kekuasaan bukan hanya untuk diri sendiri, namun kekuasaan perempuan harus mensejahterakkan masyarakat. Gramsci menjelaskan bahawa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mampu mensejahterakan, bukan hanya berkuasa, dan kemudian merugikan masyarakat.

Keterwakilan perempuan dalam politik sudah mulai terlihat dengan lahirnya undang-undang Parti pemilu dan UU Parti Politik dengan ketentuan affirmative action, kuota 30%. Dalam kebijakan affirmative action, diatur bahawa keterwakilan perempuan harus mencapai 30% dalam pencalonan anggota legislatif baik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/walikota. Ketentuan yang sama juga disarankan terpenuhi dalam kepengurusan parti politik. Ketentuan ini cukup memperoleh dukungan dari berbagai pihak walau ketentuan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum atau hanya sebagai sebuah anjuran. Namun, tidak ada ketentuan khusus dalam pencalonan di wilayah eksekutif atau kepala pemerintahan. Akan tetapi keterbukaan dan kesempatan yang besar di wilayah politik tetap tidak menyakinkan bagi aktiviti perempuan untuk aktif di politik kerana sulit bersaing dengan laki-laki. Maknanya peluang besar di wilayah politik tidak serta merta menjadikan perempuan menjadi bahagian yang aktif secara mudah dalam politik, diperlukan perjuangan yang sangat kuat dari kaum perempuan untuk menjadi bahagian dari proses politik. Hal tersebut kerana politik selama ini sudah menjadi wilayah aktiviti yang sangat nyaman dan dikuasai kaum laki-laki.

Kenyamanan itu bahkan diperkuat oleh kekuatan sosial budaya bahawa kaum laki-laki lah yang sesuai menjadi pemimpin kerana dianggap lebih rasional, sigap, cekatan, tenang, tegas, serta cepat mengambil keputusan. Laki-laki jauh

dari sifat emosional, ketakutan, lambat dalam mengambil keputusan, tidak suka bersaing, dan lebih memilih untuk melakukan kompromi agar konflik tidak terjadi. Sifat-sifat yang terakhir acapkali dilekatkan pada kaum perempuan. Sulit bagi kaum perempuan bersaing dengan laki-laki, walau kesempatan yang besar bagi kaum perempuan sudah diatur dalam kebijakan mengenai keterwakilan 30 % perempuan dalam politik.

Oleh kerananya, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, perempuan harus dikenal ketokohan dan karyanya di tengah masyarakat. Sekaligus mampu menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bawah perempuan tersebut mampu menjadi pemimpin Jakarta sebagai kota multi etnis, multi masalah, kota metropolitan, dan sumber perubahan pertama. Oleh kerananya, diperlukan kemampuan dan kekuatan perempuan jika menjadi calon Gubernur DKI Jakarta harus lebih besar dan perencanaan yang baik kerana peluang pesaing terbuka, hal itu disebabkan calon Gubernur Jakarta tidak hanya terbatas putra daerah atau yang berdomisili di Jakarta. Namun juga terbuka bagi siapapun. Berbeda dengan daerah lainnya yang masih cenderung mempertahankan bawah yang boleh mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta. Keterbukaan asal daerah calon disebabkan DKI Jakarta adalah kota khusus, ibu kota Indonesia kerana DKI Jakarta adalah daerah yang penduduknya bersal dari pelbagai daerah, milik semua bangsa Indonesia, penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang penduduknya terdiri dari pelbagai suku yang ada di Indonesia dan bukan hanya representasi masyarakat Betawi atau masyarakat tertentu lainnya, melainkan representasi seluruh masyarakat Indonesia.

Di samping belum ada ketokohan perempuan yang setaraf ketokohan kaum laki-laki dalam politik yang mengakibatkan perempuan tidak adanya calon perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 atau bahkan sepanjang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh banyak kendala yang dihadapi kaum perempuan pada saat memutuskan terjun ke politik. Realiti ini yang menyebabkan perempuan kelihatannya tidak berani atau tidak ada yang berhasil lolos sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta atau tepatnya mau mencalonkan diri mempunyai alasan-alasan yang kompleks. Alasan-alasan itu antara lain kerana alasan keluarga personal. Selama ini perempuan kerap merasa tidak mampu bersaing dengan calon laki-laki atau kerana parti politik tidak mendukung perempuan sebagai calon Cagub dan Cawagub. Realiti tidak adanya perempuan dalam pemilihan propinsi DKI Jakarta merupakan kombinasi semua alasan yang disebutkan di atas.

Masalah lainnya yang dihadapi kaum perempuan adalah soal kewangan yang terbatas. Perempuan umumnya tidak menguasai ekonomi yang memadai dan hal itu menjadi alasan terbatasnya sumber daya perempuan. Hal itu dipersulit juga dengan ketidakpercayaan parti politik mengenai kemampuan perempuan untuk mendukung kewangan parti. Kekuatan kewangan seringkali mampu mengalahkualiti seorang calon, kerana parti politik mensyaratkan seorang kader atau calon mampu membiayai kampanye dan proses politik masing-masing

sekaligus mampu mendukung pembiayaan parti politik. Tidak dapat dinafikan bahawa kegiatan-kegiatan parti membutuhkan pembiayaan dalam realisasinya.

Wang atau kekuatan kewangan menjadi penting dalam proses politik. Mengingat pembiayaan politik semakin hari bertambah mahal bahkan hampir tidak bisa dilaksanakan proses politik tanpa dukungan kewangan. Pelbagai aktiviti politik seperti; kaderisasi parti politik, kepengurusan parti, publikasi, kampanye, sosialisasi program dan calon, pemanfaatan media massa dan new media, iklan, talk show, pemanfaatan media luar ruang dan pertemuan-pertemuan langsung/face to face communications serta mimbar publik. Upaya tersebut sangat diperlukan untuk mencipta kanserta memelihara pendapat publik, juga imej positif masyarakat, termasuk dalam upaya memperoleh, mempertahankan, sekaligus memperluas kekuasaan dan pengaruh politik seseorang dan parti politik.

Realiti yang ada dalam Pemilu DKI Jakarta 2012 tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja, diperlukan upaya khusus melalui ketentuan yang berlaku di DKI Jakarta agar keterwakilan perempuan terakomodir. Sangat disayangkan, DKI Jakarta tidak mempunyai aturan khusus yang mendukung keterwakilan perempuan. Ketentuan yang ada hanya berada pada tingkat pusat iaitu kebijakan affirmative action, kuota 30 % dalam kepengurusan parti dan calon legislatif. Kebijakan dalam pejabat publik di wilayah eksekutif belum ada hingga saat ini.

Perempuan yang mempunyai beberapa syarat jika hendak menjadi calon di DKI Jakarta, iaitu 1) Kualiti yang baik, 2) Mempunyai biaya yang cukup, dan 3) Harus masuk parti. Selain itu, perempuan dapat membangun ketokohan dengan menggunakan pelbagai saluran komunikasi kerana hal itu diperlukan untuk memperkenalkan perempuan, agar mereka dikenal oleh publik sekaligus sebagai upaya penciptaan pendapat publik.

Percaya diri juga menjadi alasan perempuan untuk aktif di wilayah politik, mencalonkan diri sebagai calon serta tidak takut bersaing dengan siapapun. Tetapi disayangkan, kebanyakan perempuan masih belum percaya diri di wilayah politik. Keadaan mental tersebut, baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal diri perempuan. Kedua faktor tadi ikut menyumbang ketidakpercayaan diri perempuan. Faktor internal berkaitan dengan mental subyektif mereka dan faktor eksternal adalah faktor kewangan. Menariknya, kewangan menjadi utama kerana pembiayaan ikut menentukan banyak hal dalam proses politik. Seseorang dapat timbul kepercayaan dirinya jika perempuan tersebut mempunyai 'wang yang cukup' membiayai aktiviti politik mereka. Bahkan wang yang ada mampu membuat parti politik mencalonkan perempuan tersebut. Walaupun keadaan seperti ini tidak diharapkan muncul dalam kasus perempuan.

Dalam pemahaman feminis radikal, perempuan mengalami tekanan dari pelbagai aturan masyarakat berdasarkan atas konstruksi realiti yang mengandungi nilai marginalisasi pengalaman perempuan. Teori ini menyatakan bahawa gender merupakan konstruksi sosial yang ada yang dikonstruksi oleh laki-laki. Keadaan itu didukung sepenuhnya oleh struktur sosial, budaya, politik bahkan negara dan dilakukan kelompok elit pada tataran individual. Tataran kelompok

sosial maupun politik dan juga dengan sistematis telah dilakukan oleh negara. Maka untuk merubahnya harus dilakukan redefinisi terhadap pemahaman yang selama ini tidak berpihak pada perempuan. Dalam sistem politik Indonesia, parti politik adalah lembaga yang mempunyai hak veto atas realiti politik kader-kader parti dalam proses seleksi mencalonkan diri sebagai pemimpin DKI Jakarta. Parti politik berkuasa penuh dalam proses seleksi terhadap calon-calon baik legislatif maupun eksekutif. Maknanya, hampir tidak mungkin seorang kader atau masyarakat dapat lolos sebagai calon politik jika tidak memperoleh restu dari parti politik.

Parti politik semestinya mendukung kaum perempuan dengan program-program parti yang mampu meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi parti. Parti politik mempunyai kewajiban untuk membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus parti secara berkesinambungan. Parti politik tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30% calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai pengurus dan anggota parti politik harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota parti politik.

Aktiviti politik kaum perempuan walau sudah didukung oleh undang-undang parti politik dan undang-undang Pemilu yang menganjurkan keterwakilan perempuan didukung oleh parti politik berdasarkan kebijakan “affirmative action, kuota 30%”, akan tetapi kenyataannya persoalan berkaitan dengan aktiviti politik perempuan tetap kuat meliputi politik praktis kaum perempuan. Kebijakan tersebut tetap tidak mudah dijalankan pada awalnya kerana munculnya pro dan kontra baik dalam kehidupan sosial budaya maupun politik. Tidak semua lapisan masyarakat menerima ketentuan tersebut. Dalam wilayah politik juga banyak yang kurang bahkan tidak sepakat dengan ketentuan kuota 30%.

Banyak alasan yang membuat parti politik masih enggan mendukung aktiviti politik perempuan. Pengalaman politik perempuan yang masih kurang lama dibandingkan kaum laki-laki menjadikan pembuktian kepada masyarakat juga terbatas. Hal itu yang memunculkan persepsi sebahagian pihak bahawa perempuan masih kurang mampu dan tidak tangguh berpolitik. Padahal aktiviti politik merupakan aktiviti yang sangat melelahkan, penuh persaingan, menuntut kecepatan, dan strategi serta taktis yang tepat dengan realiti sosial politik yang ada saat itu. Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan memilih untuk tidak mencalonkan diri adalah:

1. Faktor dalaman (internal) iaitu faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam diri dan lingkungan terdekat. Perempuan kurang percaya diri atau mental, terikat dengan persoalan keluarga, dan tidak diijinkan oleh suaminya, mau tidak mau, suka tidak suka faktor internal.
2. Faktor luaran (external), iaitu faktor-faktor penghambat yang berasal dari luar diri perempuan iaitu nilai-nilai sosial budaya dan parti politik yang masih belum percaya kepada kecerdasan politik perempuan.

Perempuan harus membangun keberanian untuk aktif semaksimal mungkin

dalam politik. Perempuan harus melakukan pilihan secara bijak agar perempuan menjadi bagian dari politik praktis yang melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Asumsi dasar perjuangan dan kebijakan affirmative action, kuota 30% adalah menumbuhkan kesadaran dan kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan berpartisipasi dalam politik kerana semakin besar jumlah perempuan dalam politik diharapkan semakin besar pula dapat mempengaruhi kebijakan. Perjuangan harus tetap dilakukan kerana hasil yang ada sekarang baru langkah awal. Perjuangan tersebut tidak boleh berhenti dengan lahirnya keberanian untuk memilih aktiviti politik sebagai tujuan aktiviti sehari-hari mereka. Perempuan tidak hanya melakukan aktiviti untuk kepentingan personal mereka, melainkan juga sangat diharapkan tertarik memperjuangkan kepentingan yang lebih besar iaitu kepentingan masyarakat dan bangsa.

Peranan aktif perempuan dalam politik sekarang ini adalah sebuah kemestian, kerana hal itu merupakan amanah konstitusi dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Akan tetapi bagaimanapun perempuan sebagai individu tetap mempunyai hak untuk memilih apa yang mereka inginkan. Jadi kebutuhan terhadap politisi perempuan harus dipenuhi, tanpa menyebabkankan persoalan baru bagi keseimbangan perempuan itu sendiri. Maknanya mereka tetap mempunyai hak memilih aktiviti yang paling nyaman bagi mereka dengan mempertimbangan kebutuhan real perempuan dan lingkungan terdekat mereka sehingga ke depannya pilihan tersebut dapat mensejahterakan diri perempuan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Perempuan harus berani dan mau tampil sebagai alternatif pemimpin DKI Jakarta. Perempuan dapat menjadi pemimpin yang lebih peduli, jujur, dan berorientasi pada masyarakat. Perempuan dengan segala karakteristik yang dianggap lebih peka, sensitif, dan peduli kepada yang lain dapat menjadi nilai tambah dan kekuatan perempuan dalam memimpin Jakarta. Hal itu sangat penting agar Jakarta dapat ditangani dengan baik dan seksama yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya. Namun diperlukan usaha maksimal untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat dan parti politik menjadikan perempuan sebagai calon dan pemimpin mereka di masa mendatang. Perempuan harus mampu merebut kesempatan dan peluang dari situasi yang ada, yang mana masyarakat sering terabaikan dan kalah oleh kepentingan dan kekuatan yang lebih kuat dan besar iaitu kapitalisme.

KESIMPULAN

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya bahkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Dari 6 pasangan calon yang mendaftar tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Realiti ini menjelaskan marjinalisasi perempuan dalam politik. Kesempatan yang ada memang sudah membuka peluang kepada perempuan, namun dalam tataran praktisnya perempuan masih belum dipercaya

olehparti politik untuk berkriprah secara terbuka kecuali perempuan tersebut mempunyai kekuatan kewangan, terkenal, dan merupakan keturunan yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bahagian dari proses histories yang telah membudaya yang dalam bahasa Gramsci di sebut cultural hegemoni.

Politik sebagai ruang publik dinyatakan sebagai aktivitiyang tidak tepat bagi perempuan kerana dianggap kotor, kasar, tabu, dan aktivitas yang tidak cocok untuk perempuan.Konstruksi budaya atas realiti perempuan sangat seksies. Pemilihan peranan dan kerja cenderung berlangsung kerana pertimbangan seksual.Sistem Patriarki memunculkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki kerana pemahaman yang berbeda atas realiti laki-laki dan perempuan.Pemahaman yang berbeda tersebut mengkonstruksikan stereotype atas perempuan sebagaimana perspektif kelompok dominan.

Marjinalisasi dan kekerasan negara yang dialami oleh perempuan dalam segala bidang, khususnya di politik, salah satunya merupakan hasil dukungan persepsi budaya sebagaimana diterangkan diatas.Perempuan merasa bahawa pemahaman budaya itulah yang lazim dan sesuai untuk mereka, sehingga keadaan partisipasi perempuan dalam politik menjadi kecil, dan inilah yang terus dijaga oleh kelompok dominan dan penguasa sehingga perempuan selalu berada dalam keadaan marjinal dalam politik.Pemahaman budaya itu jugalah yang mau tidak mau ‘memaksa’ perempuan berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati oleh kelompok dominan terhadap mereka.

Dalam Pandangan feminis radikal, negara secara struktural melakukan marjinalisasi dan penindasan terhadap perempuan.Contoh nyata adalah UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan penghasilan keluarga; sedangkan suami berperanan sebagai pencari nafkah utama.Keadaan-keadaan ini melemahkan daya kompetitisi perempuan untuk menemukan sosok diri mereka sebagai manusia dan secara sistematis lalu tergantung secara:

1. Kekuasaan politik perempuan di DKI Jakarta masih minim dibandingkan jumlah pemilih perempuan. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Bukti dapat dilihat dari keadaan DPRD Jakarta periode 2009-2014 bahawa jumlah anggota perempuan adalah 22 orang dari 100 orang anggota.
2. Dalam PemiluKada Propinsi DKI Jakarta 2012 dari enam (6) pasangan calon yang dicalonkan parti politik yang ada ternyata tidak ada satupun dari pasangan tersebut baik Cagub maupun Cawagub mememenuhi keterwakilan perempuan. Maknanya tidak ada representasi perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Keadaantersebut merupakan keadaan yang tidak baik bagi keterwakilan perempuan di wilayah politik, terutama sebahagiannya masih terjadi marjinalisasi perempuan dalam politik.

Saran

1. Untuk pengembangan dan pengembangan teori sekaligus menghasilkan konsep dan mungkin teori baru maka dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori yang sama atau melakukan pengembangan teori lainnya untuk memperkaya hasil penelitian.
2. Kaum perempuan, kaum perempuan harus lebih bersatu dalam perjuangan politik yang dilakukan, mempunyai strategi yang jelas, dan konsisten dengan perjuangan yang dilakukan sehingga tujuan perjuangan yang sesungguhnya tercapai. Perjuangan bukan hanya untuk kepentingan pribadi-pribadisaja, melainkan untuk kepentingan perempuan dan masyarakat.
3. Partipolitik, sebagai satu-satunya pintu masuknya kader parti yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Jakarta, maka parti politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki seharusnya mendukung aktiviti politik perempuan secara maksimal agar perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki selama ini.
4. Masyarakat, masyarakat khususnya perempuan lebih menggalang kebersamaan dan kepercayaan terhadapaktivitipolitik perempuan. Perempuan juga harus menawarkan pola pendekatan dan pelayanan yang berbeda dibandingkan laki-laki agar kehadiran kaum perempuan disukai dan dikehendaki sebagai pemimpin ditengah masyarakat.

Catatan :

1. Pemilu adalah pemilihan umum atau pemilu raya pada peringkat Negara bahagian.
2. Politisi adalah sinkromin dari politisi selebriti iaitu politisi yang mempunyai pekerjaan sebagai artis.

BIODATA

Umaimah Wahid, M.Si. adalah pensyarah di Fakulti Komunikasi, Science Budi Luhur University, Jakarta-Indonesia. Fokus pengajian beliau adalah Political Communication, Women and Social Culture. Buku beliau yang telah terbit adalah seperti berikut: Komunikasi Politik, Perkembangan Teori dan Konsep (2012), Bunga Rampai Komunikasi Indonesia dan Artikel dalam Buku Komunikasi Dan Tantangan Masa Depan ; Matinya Rasionalitas Dalam Masyarakat Indonesia (2011) Kajian Masyarakat Komunikatif Habermas (2011) Menulis artikel Aliansi Jaringan Dalam Proses Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perempuan, Political Communication and Autonomy Perspective on

Candidat Parliament of DKI Jakarta Province in 2009, The Use of New Media; Internet in Social Development bt Local Government in Pidie Jaya Nanggroe Aceh Darussalam, dll. Pengalaman mengajar mata kuliah : Perspektif dan Teori Komunikasi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ekonomi Politik Media, Komunikais Politik dan Komunikais Massa. Penelitian yang dilaksanakan antara lain Komunikasi Polititk Kandidat DPRD DKI Jakarta 2009, Aliansi Jaringan anggota DPRD Propinsi Banten Dan Jabar, Perempuan dan Kekuasaan Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 dll. Beliau boleh dihubungi dialamat emel: *NYAKMAH@yahoo.com*

RUJUKAN

- Boqdan,1985, Robert and Taylor, Steven, Introduction to Qualitative Research Methodes, New York.
- Budiardjo, Miriam, 2002, Dasar-dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Denzim, Norman dan Lincoln, S. Yvonna, 1994, Handbook of Qualitative Research, second Edition, Sage Publishing Inc.,
- Ghaffar, Afan dkk, 2001, Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi dan Hukum di Zaman Orde Baru, PSW UMY dengan Pustaka Pelajar.
- Littlejohn, Stephen,L. 1996, The Theories of Human Communication, Wadsworth Publishing Company.
- Neuman, Laurence, W. dan Bacon, Allyn, 1997, Social Research Method:Qualitative and Quantitative Approaches, Publisher: Allyn & Bacon, Inc., New York.
- Nimmo, Dan. 2004. Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media. Rosdakarya, Bandung.
- Simon, Roger, 1999, Gramsci's Political Thought, alih bahasa oleh Kamdani dan Baehaqi, Imam..
- Salami, Leonardo, 1981, The Sociology of Political Praxis: An Introduction to Gramsci's Theory, London & Boston
- Taylor, Steve, 1999, Sociology; Issue and Debates,. Palgrave Macmillan.
- Zuhro . Siti, 2009, Demokrasi Lokal: Perubahan Dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Dan Bali, Ombak, Jakarta.
- Westwood, Sallie, 2002, Power and The Social, 1 edition,Routledge, London and New York.
- Yin, K, Robert, 1989, Case Study Research, Design and Method, SAGE Publications Inc.

